

repository.ub.ac.id

EVALUASI PENYELENGGARAAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2012 (Studi Pada KPUD dan Panwaslu Kabupaten Nganjuk)

Citra Chatami Aprilia, Saleh Soeaidi, Farida Nurani

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang

E-mail: citravisioner@yahoo.com

Abstrack

*The Distric local head (local) election is realization of democracy. From June 25, central government has given local government authority to develop has each region with the electoral district head thought straight local election as the form local democracy. This research concerned with the problem of the fraud and the infringement of the campaign with often occurred in regent election. This research will do evaluation in the implementation of local election campaign at Nganjuk Regent and Vice Regent Election in 2012. This research focus on how the evaluation during the process of Nganjuk Regent and Vice Regent election in 2012. This Research applied descriptive approach with qualitative method. Based on research result, it was acquired that there is evaluation is in the process of campaign implementation that is **pemuktakhiran** voter list. This research also found out evaluation in the implementation of campaign resulted 19 campaign infraction which has been handled by general election supervisor commite (Pilkada) which brought to the Supreme Court. Yet, the suit overruled and it's process was not going on.*

Keywords: *Politic, local Head District Election, Campaign*

Abstrak

Pemilihan Kepala Daerah merupakan wujud dari Demokrasi. Sejak Juni 2005 pemerintah pusat memberikan wewenang sepenuhnya kepada Pemerintah daerah untuk mengembangkan daerahnya masing-masing bersama Kepala Daerah terpilih melalui Pilkada langsung sebagai wujud Demokrasi lokal. Penelitian ini dilakukan terkait dengan munculnya permasalahan kecuranngan atau pelanggaran kampanye yang sering kali terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah, sehingga pada penelitian akan dilakukan evaluasi mengenai penyelenggaraan kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012. Penelitian ini berfokus pada bagaimanakah evaluasi saat proses penyelenggaraan kampanye. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh bahwa terdapat evaluasi pada proses penyelenggaraan kampanye yaitu pada Pemuktakhiran Daftar Pemilih. Pada penelitian ini juga didapatkan evaluasi yaitu pada penyelenggaraan kampanye terdapat 19 (Sembilan belas) pelanggaran kampanye yang telah ditangani oleh Panwas Kabupaten Nganjuk serta terdapat Kasus Hukum Pilkada yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, namun gugatan ditolak dan tidak dapat di proses lebih lanjut.

Kata Kunci: Politik, Pemilihan Kepala Daerah, Kampanye

1. Pendahuluan

Demokrasi merupakan sebuah paham yang memiliki semboyan “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat”. Demokrasi berarti rakyat bebas menyalurkan aspirasinya dalam menilai kinerja wakil rakyat mereka. Wakil-wakil rakyat yang meliputi DPR, DPRD Tingkat 1, dan DPRD Tingkat II, serta badan eksekutif seperti Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota,

serta Bupati dan Wakil Bupati. Adanya sistem yang demokrasi, maka para wakil rakyat dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum (Pemilu) atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Pada tahun 2004 Indonesia berhasil melaksanakan pemilu legistalif dan pemilu presiden secara langsung dengan sangat tertib dan demokratis. Keberhasilan tersebut ternyata mampu menjadikan modal semangat untuk diselenggarakannya pemilihan kepala daerah secara langsung.



repository.ub.ac.id

Masyarakat meminta agar Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dapat dipilih secara langsung oleh rakyat. Adanya permintaan tersebut oleh rakyat, maka pemerintah merespon baik dengan merevisi Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Adanya respon yang baik dari pemerintah, sehingga sejak Juni tahun 2005 dengan adanya otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan wewenang sepenuhnya kepada pemerintah daerah/lokal. Wewenang tersebut untuk mengatur dan mengembangkan serta mengkreaitivaskan daerahnya masing-masing bersama kepala daerah terpilih melalui Pilkada langsung sebagai perwujudan demokrasi lokal yang telah dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia.

Sistem demokrasi selama ini telah dijadikan sebagai sistem politik di negara Indonesia, dengan berasaskan Pancasila dan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat daerah, maka ada sebuah “Pesta Demokrasi Daerah” atau Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) untuk menentukan kepala daerah yang sesuai dengan suara mayoritas masyarakat yang nantinya akan memimpin daerah tersebut, seperti yang diungkapkan di dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat 4 “Kepala Daerah dipilih Secara Demokratis”, artinya bahwa rakyat perlu berpartisipasi dan mempertanggung jawabkan partisipasinya. Salah satu perwujudan adanya partisipasi politik masyarakat yaitu dapat melalui proses pemilihan penguasa. Keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan ini mampu mendorong adanya suatu upaya dari aparat pemerintah untuk dapat menyalurkan aspirasi-aspirasi yang berkembang di kalangan masyarakat.

Pada pemilihan kepala daerah, sejak Indonesia merdeka hanya dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat, namun dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 harus dilakukan pemilihan secara langsung. Adanya perubahan sistem ini, menyebabkan semua pihak terutama para politisi dan elit daerah harus benar-benar menyiapkan strategi khusus jika mereka mau untuk ikut bertarung dalam Pilkada. Setiap peserta atau kandidat

Pilkada, merupakan perwakilan atau orang yang diusung dari partai politik untuk dapat menduduki posisi strategis dalam pemerintahan, namun ada juga kandidat atau peserta yang membawa dirinya atas nama independen atau tidak di usung dari partai politik.

Menduduki posisi strategis dalam pemerintahan, tentunya menjadi ambisi dari setiap partai politik, karena dengan begitu segala macam kebijakan yang diputuskan, akan dipengaruhi oleh kepentingan partai politik tersebut. Sehingga mereka harus merancang strategi dengan kuda-kuda yang tangguh untuk dapat mempengaruhi masyarakat saat kegiatan kampanye.

Pada pelaksanaan Pilkada perlu adanya evaluasi untuk dapat melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan Pilkada selanjutnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini dengan dua rumusan masalah yaitu; (1) Evaluasi pada tahapan penyelenggaraan kampanye yang dilaksanakan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012; (2) Bagaimanakah evaluasi penyelenggaraan kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012.

2. Teori

2.1 Administrasi Publik

Administrasi adalah proses kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan tertentu. Sedangkan Administrasi Publik menurut Felix A. Nigro dan Lloyd G.Nigro dalam Indradi (2008 :12) menerangkan bahwa administrasi publik adalah;

- a. Usaha yang dilakukan oleh sekelompok manusia yang memiliki sifat kooperatif dengan diselenggarakan dalam satu lingkungan publik;
- b. Adinistrasi public memiliki tiga cabang pemerintahan : eksekutif, yudikatif, legislatif, serta pertalian diantara ketiganya;

- c. Memiliki peranan yang penting dalam formulasi kebijakan publik (*public policy*) dan merupakan bagian proses politik;
- d. Berbeda dengan administrasi privat;
- e. Memiliki hubungan yang erat dengan kelompok-kelompok privat dan individual dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

Pengertian-pengertian mengenai administrasi publik diatas, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan kegiatan dua orang atau lebih yang bekerjasama untuk dapat mewujudkan tujuan tertentu dengan dasar efektif, efisien, dan rasional.

2.2 Hubungan Administrasi Publik dengan Pilkada

Pandangan mengenai administrasi negara di Indonesia ternyata dikenal sebagai pendekatan yang digunakan dalam manajemen negara, di mana menekankan pada orientasi kekuasaan negara.

Pada administrasi negara, istilah publik ditekankan pada pemahaman negara atau pemerintahan, sehingga ilmu administrasi publik dapat diartikan sebagai ilmu administrasi negara atau administrasi pemerintahan. Adanya penjelasan tersebut mengartikan bahwa administrasi publik sebagai administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh aparat pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

Ilmu administrasi publik merupakan suatu kajian yang sistematis dan bukan hanya sekedar abstraksi, namun juga memuat adanya perencanaan yang realistis untuk menata pemerintahan yang baik (*good governance*). Wujud dari adanya tata pemerintahan yang baik adalah citra pemerintah yang demokratis. Pada pemerintahan yang *modern*, sangat tidak mungkin sekali manajemen birokrasi yang dijalankan terlepas dari kontrol masyarakat. Sebuah negara yang pemerintahannya demokratis, akan meletakkan pejabatnya melalui pemilihan oleh rakyat.

Adanya landasan sebagai wujud dari tata pemerintahan yang baik adalah terciptanya demokrasi yang baik.

Untuk mewujudkan demokrasi yang baik, negara Indonesia menampilkan peran rakyat yang dinamis dalam percaturan politik nasional maupun lokal melalui adanya pemilihan kepala daerah secara langsung.

Peran masyarakat ini akan berkesinambungan dengan adanya partai politik. Adanya partai politik ini berguna sebagai pengawas pelaksana pemerintahan di bawah kepemimpinan presiden. Peran administrasi publik di sini adalah sebagai upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yaitu sebagai merancang dan menata kebijakan, implementasinya hingga pada evaluasi.

2.3 Evaluasi

Dunn (2000:608) menjelaskan bahwa istilah evaluasi memiliki arti yang berhubungan dimana menunjuk pada skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Dye dalam Parsons (2006:57) menjelaskan evaluasi kebijakan adalah pemeriksaan yang objektif, sistematis, dan empiris. Sedangkan menurut Suchman dalam Wahab (2000:608) pengertian evaluasi adalah proses memberikan penilaian dalam menentukan derajat keberhasilan melalui nilai-nilai yang telah ditentukan sebelumnya.

2.4 Politik

Pengertian politik adalah kegiatan untuk mengatur individu dengan individu, individu dengan negara, atau negara dengan individu. Berikut adalah teori – teori politik yang digunakan dalam melakukan penelitian evaluasi penyelenggaraan kampanye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012;

a. Ideologi Politik

Ideologi politik meliputi pembahasan dan diagnosa, serta saran-saran (*prescription*) mengenai bagaimana mencapai sebuah tujuan yang ideal. Ideologi merupakan sebuah hal yang jauh berbeda dengan filsafat, karena filsafat bersifat merenung, mempunyai tujuan untuk menggerakkan kegiatan dan aksi (*action oriented*);

b. Budaya Politik

Almond dan Verba mengutarakan definisi budaya politik yang di kutip kembali oleh Gaffar (2006:99), yaitu merupakan sikap individu terhadap sistem politik serta sikap individu yang dilakukan dengan bermain peran dalam sebuah sistem politik;

c. Sistem Politik

Sumantri dalam Syafie (2009:331) mengatakan bahwa sistem adalah kelompok yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu tujuan bersama. sistem politik merupakan alokasi daripada nilai-nilai, di mana pengalokasian nilai-nilai tadi bersifat paksaan atau dengan kewenangan, dan pengalokasian yang bersifat paksaan tadi mengikat masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Sistem politik, adalah sistem interaksi atau hubungan yang terjadi di dalam masyarakat dengan menggunakan paksaan yang di mana bersifat sah.

d. Partai Politik

Miriam Budiardjo (2008:403-404) mendeskripsikan partai politik yaitu kelompok yang terorganisir dimana anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama. Kelompok ini memiliki tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan dapat memperoleh kedudukan, sehingga secara konstitusional program-programnya dapat terlaksana. Partai politik merupakan sebuah wadah atau sarana yang terorganisir untuk berpartisipasi sesuai dengan fungsinya, serta memiliki kemampuan untuk memperjuangkan negara.

e. Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan sekelompok orang atau individu yang ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yang di mana mereka ikut memilih pemimpin negara serta baik secara langsung maupun tidak langsung ikut mempengaruhi dalam menentukan kebijakan.

f. Mobilisasi Politik

Definisi mobilisasi merupakan pengembangan dari adanya hubungan sosial antara dua faktor, individu, dan partai. Aktivitas dalam mobilisasi terjadi dalam tiga proses, yaitu proses kepentingan

(dimensi kognitif), proses pembentukan komunitas (dimensi afektif), dan proses pemanfaatan instrument (dimensi instrumental). Mobilisasi politik merupakan usaha aktor dalam mempengaruhi distribusi kekuasaan.

Mobilisasi politik tidak sekedar proses warga negara yang dilibatkan dalam kegiatan politik, namun juga sebagai tiga gejala sosial. Tiga gejala sosial itu adalah (1) aspek sosial dan ekonomi seperti pada penjelasan teori mobilisasi sosial tradisional (2) mobilisasi sebagai usaha pembersihan rejim totaliter (3) mobilisasi mengacu pada proses melibatkan warga negara dalam kegiatan politik.

Mobilisasi dikategorikan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu mobilisasi langsung dan mobilisasi tidak langsung. Mobilisasi langsung merupakan sebuah kegiatan mobilisasi dengan cara mengarahkan pemilih agar melakukan tindakan politik sesuai yang dikehendaki oleh partai politik. Mobilisasi tidak langsung adalah kegiatan dimana mempengaruhi cara berpikir atau pandangan pemilih, sehingga pemilih akan mengeksplorasi pemahamannya dalam sebuah bentuk keputusan politik.

2.5 Kampanye

Venus dalam oleh Rosady (2005:23-24) memberikan definisi mengenai kampanye melalui berbagai pendapat para ahli;

- a) Leslie B. Snyder (2002) dalam Venus (2004) dalam Rosady (2005), Kampanye komunikasi adalah komunikasi yang terorganisir yang telah terencana dan dalam waktu serta tujuan tertentu;
- b) Pfau dan Parrot (1993) dalam Venus (2004) dalam Rosady (2005), kampanye yang dilaksanakan secara sadar dan terencana dengan periode tertentu dengan tujuan untuk mempengaruhi masyarakat
- c) Rogers dan Storey (1987) dalam Venus (2004) dalam Rosady (2005), kampanye adalah rangkaian kegiatan komunikasi yang terorganisir untuk menciptakan dampak tertentu bagi khalayak dalam periode dan waktu tertentu.

Dari berbagai definisi beberapa pakar, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian kampanye adalah kegiatan-kegiatan; 1) proses aktivitas komunikasi kampanye untuk mempengaruhi khalayak tertentu, 2) membujuk dan memotivasi khalayak untuk ikut berpartisipasi, 3) bertujuan untuk menciptakan efek atau dampak seperti yang telah direncanakan, 4) dilaksanakan dengan tema yang spesifik dan terdapat nara sumber yang jelas, 5) dilaksanakan secara terorganisasi dengan kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan untuk kepentingan kedua belah pihak atau sepihak.

Dalam melakukan kegiatan berkampanye, terdapat beberapa jenis program kampanye yang sering sekali dilaksanakan secara prinsip untuk memotivasi, membujuk, serta untuk menggapai tujuan tertentu. Kegiatan berkampanye untuk memenangkan suatu tujuan, harus didukung oleh strategi yang baik dan terorganisir. Strategi kampanye harus dirahasiakan oleh para ahli perencana kampanye.

Dalam buku Hafied Cangara (2011:236-237) mengungkapkan;

- a) Marthin – Anderson (1968), strategi kampanye adalah senimenyatakan pikiran dengan sumber daya yang ada untuk meenggapai suatu tujuan tertentu dengan memperoleh keuntungan yang maksimal dan efisien;
- b) Marthin – Anderson (1968), strategu kampanye adalah efek yang dirancang untuk mencapai tujuan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat studi deskriptif kualitatif. Alasan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena penelitian ini mengungkapkan apa yang terjadi di lapangan, data yang disimpulkan berupa kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis penelitian ini dipilih dan digunakan, dimana pendekatan metode kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan

fakta-fakta yang berkaitan dengan penyelenggaraan kampanye yang dilakukan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012. Pada penggunaan pendekatan ini, diharapkan nantinya akan mengetahui dan mengevaluasi program penyelenggaraan kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012.

Penelitian ini ditentukan berdasarkan karakteristik dari adanya penelitian evaluasi kebijakan itu sendiri. metode penelitian evaluasi kebijakan digolongkan menjadi dua macam sesuai dengan tipe penelitian evaluasinya, yaitu metode deskriptif dan metode kausal. Seperti yang diutarakan oleh Langbein dalam Widodo (2008:116-118) bahwa metode deskriptif mengarah kepada tipe penelitian evaluasi proses atau (*process of public policy implementation*), sedngkan dalam metode kausal lebih mengarah kepada penelitian evaluasi dampak atau sering disebut dengan (*outcomes of public policy implementation*).

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian evaluasi pelaksanaan kampanye pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk ini merupakan sebuah evaluasi eksternal, di mana peneliti tidak memiliki keterlibatan langsung di dalam formulasi serta implementasi kebijakan maupun peraturannya. Waktu penelitian yang dilakukan di KPUD serta Panwaslu Kabupaten Nganjuk yaitu pada saat mulai hari pelaksanaan Pilkada dan setelah berakhirnya Pilkada, dan penelitian evaluasi ini bersifat *ex post interim*.

Adanya evaluasi penyelenggaraan kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk tahun 2012 ini, fokus pertama yang diambil oleh peneliti adalah evaluasi pada tahap proses penyelenggaraan kampanye. Pada tahapan proses penyelenggaraan, akan dievaluasi setiap bentuk kegiatannya. Begitu pula pada fokus yang kedua yaitu pada tahap pelaksanaan kegiatan kampanye atau saat berlangsungnya kampanye.

1) *Evaluasi Proses Penyelenggaraan Kampanye*

a) *Sosialisasi dan Himbauan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan menghindari Money Politik*

Dalam evaluasi proses tahapan penyelenggaraan kampanye, KPU Kabupaten Nganjuk merasakan adanya kesulitan dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat. KPU Kabupaten Nganjuk telah berupaya dengan maksimal untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi dengan membuat *pamphlet*, dan sosialisasi langsung ke pasar-pasar. Upaya lain yang dilakukan adalah sosialisasi dengan mengajak masyarakat Nganjuk untuk mengikuti jalan santai yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Nganjuk. Upaya ini dilakukan karena masyarakat Nganjuk masih memiliki sifat pragmatis, sehingga dengan adanya ajakan melalui kegiatan hiburan ini, masyarakat dapat lebih aktif untuk berpartisipasi.

Kecilnya nilai partisipasi masyarakat kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan Pilkada, salah satu faktor lainnya yang mempengaruhi adalah masyarakat tidak memiliki kepercayaan kepada Bupati dan wakil Bupati terpilih nantinya karena ada pemikiran bahwa pemimpin yang sudah mempunyai kedudukan yang layak terkadang tidak berpengaruh pada masyarakat menengah kebawah. Hal tersebut menyebabkan kurangnya *respect* dari masyarakat sehingga menyebabkan masyarakat untuk memilih tidak berpartisipasi dalam Pilkada.

b) *Permutakhiran Data Pemilih*

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pada saat permutakhiran data pemilih terjadi permasalahan mengenai pemilih yang belum masuk pada daftar pemilih. Terdapat dua pemilih yang belum masuk dalam daftar pemilih, yaitu di Kecamatan Kertosono dan di Kecamatan Prambon. Permasalahan tersebut pada akhirnya dapat terselesaikan dengan baik. Panwas

memberikan rekomendasi yang dimasukkan ke PPK kemudian di proses oleh KPU dan selanjutnya Panwas menindaklanjuti.

c) *Pencalonan dan Penetapan Pasangan Calon*

Tabel 1
Pasangan Tetap Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012

No.	Calon Bupati Calon Wakil Bupati	Keterangan
1.	Calon Bupati : H. Njono Djojo Astro Calon Wakil Bupati : KH. A. Syaiful Anam	Perseorangan
2.	Calon Bupati : Drs. H. Taufiqurrahman Calon Wakil Bupati : KH. Abdul Wachid Badrus, MPd.I.	Gabungan PDIP dan PKB
3.	Calon Bupati : H. Yusmanito, SH. Calon Wakil Bupati : Gatot Nursalim, SE	Perseorangan
4.	Calon Bupati : Ir. Suci Pamomo, MM. Calon Wakil Bupati : KH. Djaelani	Gabungan Partai Paniot dan PKNU
5.	Calon Bupati : Ir. Hji Siti Nurhayati, MM. Calon Wakil Bupati : Sumardi, SH.	Gabungan Partai Golkar, PKS dan PBR
6.	Calon Bupati : KPH. Pied Yudianto Calon Wakil Bupati : Basuki, SH, MH.	Gabungan Partai Demokrat, PAN, HANURA, GERINDRA

Sumber: KPUD Kabupaten Nganjuk Tahun 2012

Dari tabel di atas, pasangan tetap calon Bupati dan Wakil Bupati dapat diketahui apakah mereka berasal dari partai ataupun independen. Dari keenam pasangan calon tetap, terdapat dua pasangan calon yang diusung secara independen, dan terdapat empat pasangan calon yang diusung melalui koalisi partai politik.

d) *Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012*

Pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon yang dilaksanakan melalui rapat Pleno terbuka yang berlangsung pada tanggal 23 Oktober 2012. Dengan menghadirkan Pasangan Calon, wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon, Panwaslu Kabupaten Nganjuk, media massa, serta tokoh masyarakat.

e) *Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pertemuan Terbatas, Tatap Muka dan Dialog dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012*

Berdasarkan Keputusan Komisi Peilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 27/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum, Pertemuan Terbatas, Tatap Muka dan Dialog Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, berikut table jadwal kampanye tersebut ;

No. Urut Pasangan	Nama Pasangan Calon	November 2012					Desember 2012								
		25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ir. Hj. Siti Nurhayati, MM dan Sumardi, SH.														
2.	Drs. H. Taufiqurrahman dan KH. Abdul Wachid Badrus, M.PdI														
3.	H. NJONO DOJJO ASTRO dan KH. A Syaiful Anam, S.PdI M.Si														
4.	Ir. Suci Purnomo, MM dan KH. Djaelani														
5.	KPH. Pied Yudianto dan Basuki, SH MH														
6.	H. Yusmanto, SH dan Gatot Nursalim, SE														

Sumber: KPUD Nganjuk Tahun 2012

Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk dilaksanakan mulai tanggal 25 November 2012 dan berakhir pada tanggal 8 Desember 2012. Kegiatan hari pertama kampanye dilaksanakan dengan penyampaian visi, misi dan program dalam sebuah rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk. Setiap pasangan calon memiliki kesempatan 2 (dua) kali untuk rapat umum. Kemudian pada tanggal 8 Desember 2012, seluruh Pasangan Calon melakukan kampanye dalam bentuk debat publik atau debat terbuka antar calon. Debat publik merupakan bentuk kegiatan kampanye baru yang dilaksanakan selama kegiatan Pilkada Nganjuk yang pernah ada.

Pada kampanye terbuka atau debat terbuka, masyarakat Nganjuk cukup antusias dalam menghadiri debat terbuka tersebut. Hasil Wawancara peneliti dengan Ketua Panwaslu “Acara debat terbuka dilaksanakan di Gedung Juang 45 Nganjuk. Dihadiri oleh kurang lebih 1000 (seribu) orang. Diluar ruangan diberi layar LCD juga.” (Hasil wawancara bulan Juni 2013).

2) Evaluasi Kegiatan Penyelenggaraan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012

I. Catatan-catatan Khusus yang Terjadi Selama Kegiatan Kampanye

- a) Catatan khusus yang terjadi pada kegiatan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas dan tatap muka/dialog

Pada pelaksanaan kampanye dalam bentuk tatap muka terjadi ketidaksesuaian jumlah peserta yang hadir. Peserta yang hadir melebihi kapasitas maksimal yang diperbolehkan. Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk No.10 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 pada sub bab Bentuk kampanye poin ke dua dijelaskan bawa jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten.

Pada kegiatan kampanye ini dapat menghadirkan banyak pasrtisipasi masyarakat, namun kehadiran masyarakat saat kampanye tidak sebanding dengan kehadiran masyarakat pada saat hari dan tanggal pemilihan.

Kegiatan kampanye tatap muka ini seharusnya menjadi salah satu media sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk tahun 2012, sehinga melalui kampanye tatap muka ini, masyarakat dapat berfikir pasangan calon yang mana yang lebih cocok untuk Kabupaten Nganjuk dan untuk masyarakat Nganjuk berdasarkan visi dan misinya.

- b) Catatan khusus yang terjadi pada kampanye Rapat Umum

Pada kegiatan kampanye dalam bentuk rapat umum, terjadi pawai arak-arakan kendaraan bermotor. Terjadinya hal demikian, KPU Kabupaten Nganjuk beserta seluruh jajaran penyelenggara Pemilu melakukan koordinasi dengan Panwalu dan tim kampanye agar terdapat kesadaran pada masyarakat pemilih untuk mematuhi regulasi agar pelaksanaan kampanye tertib dan lancar.

- c) Catatan berkenaan dengan pelaksanaan kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum

Catatan khusus yang terjadi pada penyebaran bahan kampanye kepada umum telah dijelaskan dalam peraturan Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye, bahwa tidak diperbolehkan memasang atau menempelkan bahan kampanye dan atau alat peraga pada tempat ibadah, tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan serta pada fasilitas umum lainnya. KPU Kabupaten Nganjuk dan Panwaslu dalam hal ini harus berkoordinasi dengan tim sukses dan seluruh pelaksana kampanye agar senantiasa mematuhi peraturan mengenai kampanye dan agar memiliki rasa untuk mencintai dan menjaga keindahan kota.

- d) Catatan khusus pada kegiatan audit Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK)

Audit Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye yang telah diatur dan dijelaskan dalam Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye, telah dilaksanakan dengan baik oleh seluruh Pasangan Calon dan Tim Sukses pelaksana kampanye. Dalam hal ini walaupun sanksi tidak dituliskan dalam peraturan, namun seluruh pasangan calon beserta tim kampanye secara *sportif* menyampaikan penggunaan dana kampanye meskipun pada saat itu telah diketahui nama pasangan calon yang memiliki suara terbanyak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012.

- II. Pelanggaran – pelanggaran yang teridentifikasi saat kegiatan kampanye berlangsung

1. Pada tanggal 13 Oktober 2012, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Sawahan melaporkan bahwa di Ngliman Sawahan terjadi sebuah pelanggaran, yaitu ada pertemuan silaturahmi di mana dalam kegiatan tersebut terdapat pembagian sembako

serta pemberian uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu) rupiah

2. Pada tanggal 10 Oktober 2012, Panwascam Baron menemukan pemasangan gambar pasangan calon nomor urut 1 (satu) yaitu Siti Nurhayati dan Sumardi (SIMA), yang diiringi dengan pertunjukan jaranan
3. Pada tanggal 21 November 2012, Panwascam Gondang menemukan adanya pengurus GP Anshor Gondang yang menyerahkan buku kumpulan soal-soal ujian yang pada bagian sampulnya terdapat gambar pasangan calon Taufiqurrahman
4. Pada tanggal 27 November 2012, Panwascam Gondang melaporkan adanya kampanye di desa Pandean Gondang dengan mengadakan penjualan beras murah
5. Pada tanggal 27 November 2012, Panwascam Rejoso melaporkan adanya tasyakuran Ulang Tahun PGRI se-Kabupaten Nganjuk yang pada awalnya akan dihadiri oleh Pasangan Calon Taufiqurrahman namun ternyata tidak jadi hadir
6. Pada tanggal 24 November 2012, Panwascam Baron melaporkan adanya pertunjukan *elektone* yang di mana dalam kegiatan tersebut selalu dikatakan “dukung Taqwa dalam Pemilukada 12/12/12”
7. Pada tanggal 19 November 2012, Panwascam Bagor melaporkan bahwa dalam acara yang diselenggarakan di SMKN 1 Bagor yang dihadiri oleh Pasangan Calon Nomor urut 2 yaitu Taufiqurrahman. Dalam acara tersebut seorang pembawa acara mengajak undangan untuk memilih Pasangan Calon Nomor urut 2 (Taufiqurrahman)
8. Pada tanggal 21 November 2012, Panwascam Bagor melaporkan bahwa dalam acara jalan santai SMKN 1 Bagor yang dihadiri oleh Pasangan Calon Nomor urut 2 yaitu Taufiqurrahman. Taufiqurrahman melakukan foto bersama anak-anak dengan gaya foto menunjuk dua jari
9. Pada tanggal 24 November 2012, Panwascam Kertosono melaporkan bahwa ditemukan adanya selisih

- jumlah pemilih dalam DPS ke DPT sebanyak 342 orang.
10. Pada tanggal 24 November 2012, tim kampanye SIMA melaporkan adanya larangan penggunaan lapangan untuk kampanye di Desa Singkalanganyar Kecamatan Prambon oleh Kepala Desa setempat
 11. Pada tanggal 20 November 2012, Panwascam Nganjuk melaporkan adanya pembagian *voucher* untuk mengambil sembako saat kampanye tim Taqwa.

KESIMPILAN

Penyelenggara Pilkada dapat berjalan dengan baik, namun pada kenyataan di lapangan masih terdapat masyarakat yang terlibat dari kegiatan *money politic* dan partisipasi masyarakat pada hari dan tanggal pemilihan masih sangat rendah.

Pada kegiatan kampanye dengan Acara sosialisasi, berjalan dengan lancar

dan tertib dan setiap pasangan calon beserta tim sukses mampu mentaati jadwal Pilkada yang telah dibuat oleh KPUD Nganjuk, mulai dari jadwal pendaftaran atau pencalonan hingga pada hari dan tanggal pemilihan.

Ketentuan mengenai penyelenggaraan kampanye, bahwa pasangan calon dan tim sukses kurang kesadaran untuk mentaati ketentuan dan peraturan yang telah dibuat dalam hal teknis kampanye. Terdapat pelanggaran kampanye yang sebenarnya telah dijelaskan dalam teknis kampanye tentang apa saja yang menjadi larangan kampanye. Serta evaluasi mengenai pelaporan dana kampanye dan audit dana kampanye dilaksanakan dengan baik oleh setiap pasangan calon.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Noor M dan tim. 2011. *Pemilihan Kepala Daerah*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kencana Inu, dan Azhari. 2008. *Sistem Politik Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- Mulyasantosa, Nandang. 1983. *Tanya Jawab Sistem Politik (Political Sistem)*. Armico, Bandung.
- Parsons, Wayne. 2006. *Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*. Kencana. Jakarta.
- Syafie, Inu Kencana. 2009. *Pengantar Ilmu Politik: Dari Keseimbangan Good Governance dengan Clean Government Sampai Pada State of The Art. Ilmu Politik dalam Mengubah Politik Biadab Menjadi Politik Beradab*. Cetakan Pertama, Pustaka Reka Cipta, Bandung .
- Sukarna. 1992. *Sistem Politik Indonesia II*. Mandar Maju, Bandung .
- Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Malang: Banyumedia Publishing*.
- Wahab, Solichin Abdul. 2000. *Evaluasi kebijakan publik. IIKIP Malang Press, Malang*
- Wahab, Solchin Abdul. 2001. *Evaluasi kebijakan publik. IIKIP Malang Press, Malang*